

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*Learning process*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


RADIMAS, S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003

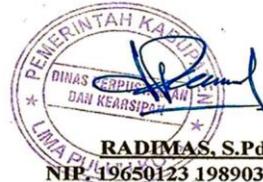
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut akan disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamak, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



RADIMAS, S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Daftar isi	iii
LRA	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan	2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
2.1 Kebijakan Keuangan.....	4
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	4
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	9
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
4.1 Ekuitas Akuntansi	11
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	13
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA	13
4.4.2 Kebijakan Akuntansi pendapatan – LO.....	14
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja	14
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban	14
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja	16
5.2 Neraca	18
5.3 Laporan Operasional	21
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	27
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	28
BAB VII PENUTUP	29

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.01	Pajak Daerah-LRA				
1.1.02	Retribusi Daerah-LRA	-	-		
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
1.1.04	Lain-lain PAD yang Syah				
	JUMLAH PAD	-	-		-
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.01	Belanja Pegawai	2,336,813,723.00	2,319,403,692.00	99.25	2,167,124,513.00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991,215,686.00	985,504,004.00	99.42	815,951,316.00
2.1.05	Belanja Hibah	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00	-
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Belanja Operasi	3,370,029,409.00	3,346,907,696.00	99.31	2,983,075,829.00
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.01	Belanja Modal Tanah				
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00	-
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,000,000,000.00	9,380,290,289.00	93.80	39,500,000.00
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				214,033,684.00
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	76,550,000.00	75,946,400.00	99.21	
	Jumlah Belanja Modal	10,078,500,000.00	9,458,186,689.00	93.85	253,533,684.00
	JUMLAH BELANJA	13,448,529,409.00	12,805,094,385.00	95.22	3,236,609,513.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(13,448,529,409.00)	(12,805,094,385.00)	95.22	(3,236,609,513.00)

Sarilamak, Januari 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NERACA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No. Akun	Uraian	2021	2020
1.	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
1.1.01.	Kas dan Setara Kas		
1.1.01.02.	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.01.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.01.04.	Kas di BLUD		
1.1.01.05.	Kas Dana BOS		
1.1.01.06.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
1.1.01.07.	Kas Lainnya		
1.1.03.	Piutang Pajak Daerah		
1.1.04.	Piutang Retribusi		
1.1.05.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.05.03.	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
1.1.06.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.06.06.	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.06.07.	Piutang Pendapatan Bunga		
1.1.06.16.	Piutang Pendapatan BLUD		
1.1.06.18.	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
1.1.06.19.	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1.1.07.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
1.1.07.01.	Piutang Dana Perimbangan		
1.1.08.	Piutang Transfer Antar Daerah		
1.1.08.01.	Piutang Bagi Hasil		
1.1.09.	Piutang Lainnya		
1.1.10.	Penyisihan Piutang		
1.1.10.01.	Penyisihan Piutang Pendapatan		
1.1.10.01.01.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1.1.10.01.02.	Penyisihan Piutang Retribusi		
1.1.10.01.03.	Penyisihan Piut. Hasil Pengel. Keky. Daerah Yg Dipisahkan		
1.1.10.01.04.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah		
1.1.12.	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar	-	-
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.01.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
1.2.01.05.	Dana Bergulir		
1.2.01.05.01.	Dana Bergulir Kepada Koperasi		
1.2.01.05.02.	Dana Bergulir Kepada Masyarakat		
	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		
	Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya		
1.2.02.	Investasi Jangka Panjang Permanen		
1.2.02.01.	Penyertaan Modal		
	Jumlah Investasi Jk. Panjang Permanen		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
1.3.	ASET TETAP		
1.3.01.	Tanah	1.644.441.684,00	1.644.441.684,00
1.3.02.	Peralatan dan Mesin	2.301.581.805,00	2.102.588.805,00
1.3.02.	Gedung dan Bangunan	9.602.448.443,00	543.745.000,00
1.3.04.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.172.246,00	-
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	683.371.370,00	607.424.970,00
1.3.06.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	74.628.400,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.360.902.999,60	1.998.846.290,21
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.087.172.655,00	1.940.771.380,00
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	253.813.120,00	58.074.910,21
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.917.224,60	-
1.3.07.04.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Tetap	12.070.112.548,40	2.973.982.568,79
1.5.	ASET LAINNYA	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	118.500.000,00	118.500.000,00
1.5.04.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.	Aset lain-lain	-	-
1.5.04.01.01.0001.	Aset Rusak Bersih/Usang	-	-
1.5.04.01.01.0002.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
1.5.06.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	118.500.000,00	118.500.000,00
	JUMLAH ASET	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.1.01.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka		
2.1.06.	Utang Belanja		
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa		
2.1.06.02.02.	Utang Belanja Jasa		
2.1.06.02.02.0059.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon		
2.1.06.02.02.0060.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		
2.1.06.02.02.0062.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
3.	EKUITAS		
3.1.	EKUITAS		
3.1.01.	EKUITAS		
3.1.01.01.	EKUITAS		
3.1.01.01.01.	EKUITAS	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79
	JUMLAH EKUITAS	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79

Sarilamak, Januari 2022



Mutasi Tambah AT (Diluar BM 2021)

	2020			2021
		Tambah	Kurang	
1 TANAH	1,644,441,684			1,644,441,684
	BM 2021			1,644,441,684
2 PM	2,102,588,805			2,301,581,805
	BM 2021	1,950,000.00		2,301,581,805
	Reklass masuk dari GB	197,043,000.00		Pengadaan mesin genset
3 G & B	543,745,000.00			9,602,448,443
	BM 2021	9,380,290,289.00		9,602,448,443
	Reklass masuk dari KDP	74,628,400.00		DED bangunan gedung kantor
	Reklass keluar ke PM		197,043,000	Jalan Kantor
	Reklass ke JIJ		199,172,246	Mesin Genset
4 JIJ	-			199,172,246
	BM 2021			199,172,246
	Reklass masuk	199,172,246		Mesin Genset
5 AT Lainnya	607,424,970			683,371,370
	BM 2021	75,946,400		683,371,370
6 KDP	74,628,400			-
	Reklas Keluar		74,628,400	DED bangunan gedung kantor
7 Aset Lainnya	118,500,000			118,500,000
	BM 2021			118,500,000
		9,929,030,335	396,215,246	
		B. Modal 2021	9,458,186,689	
	PEND. DARI PENDAPATAN HIBAH PUSAT			
		Rekap +/-Aset	74,628,400	

Mutasi tambah aset tetap
 Mutasi kurang aset tetap
 Kapitalisasi barang jasa
 BM tidak dikapitalisir
 Aset ekstrakom

-
 - Mengurangi beban
 - dicatat sebagai beban lain-lain
 - dicatat sebagai beban lain-lain

INFO AKRUAL :

1 PENDAPATAN :

Retri-LRA 21	-	
Piut-20 Tertagih 21	-	
Ret-LO	-	
Piut- 21	-	
Ret-LO-21 Final	-	

2 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

- 2019	50 % x Rp. 1.800.000,00	-
- 2020	10 % x Rp. 4.200.000,00	-
- 2021	0,5 % x Rp. 236.514.000,00	-
- 2021 /Karcis		-

- Belum di verifikasi

4 PERASEDIAAN :

MISAL :1

	2021	2020
SISA DI NERACA AWAL	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	133,943,300.00	-
Persediaan dr Cetak.	-	-
SISA DI NERACA AKHIR	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	133,943,300.00	-

	2021	2020	Belanja LRA	Beban LO
ATK	-	-	41,915,500.00	41,915,500.00
Alat Listrik	-	-	1,293,000.00	1,293,000.00
Alat Kebersihan	-	-	-	-
Obat-obatan	-	-	684,000.00	684,000.00

5 BEBAN PENYUSUTAN

A. PERALATAN DAN MESIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	(1,940,771,380.00)	12/31/2020
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(2,087,172,655.00)	12/31/2021
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	146,401,275.00	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	(58,074,910.21)	12/31/2020
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(253,813,120.00)	12/31/2021
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	195,738,209.79	

C. JIJ

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	-	12/31/2020
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(19,917,224.60)	12/31/2021
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	19,917,224.60	

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	0	12/31/2020
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	12/31/2021
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	

E. ASET LAIN-LAIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	0	12/31/2020
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	12/31/2021
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP **362,056,709.39** 2021

Beban Penyusutan Tahun Sebelumnya **-** 2020

6 Beban Utang Jk Pendek :	UJP 2021	2020	2021	Belanja LRA	Beban LO
Air	-	-	0		
Listrik	-	-	0		
Telpon	-	-	-		
Speedy	-	-	-		
TV Kabel	-	-	-		
Utang Jasa Layanan	-	-	-		

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Kode Akun	Uraian	2021	2020	Bertambah/ Berkurang	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.	PENDAPATAN				
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		
7.1.01.	Pajak Daerah-LO	-	-		
7.1.02.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	-	-		
7.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-		
	JUMLAH PAD	-	-		
7.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	-	-		
7.2.01.01.	Dana Perimbangan-LO	-	-		
7.2.01.02.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-		
7.2.01.05.	Dana Desa-LO	-	-		
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0	0		
7.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0	0		
7.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	-	0		
7.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-		
7.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	-	-		
7.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	-	-		
	JUMLAH TRANSFER	0.00	0		
7.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0	0		
7.3.01.	Pendapatan Hibah-LO	-	-		
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00		
8.	BEBAN	3,708,964,405.39	3,529,045,538.74		
8.1.	BEBAN OPERASI	3,346,907,696.00	2,783,509,829.00		
8.1.01.	Beban Pegawai	2,319,403,692.00	2,167,124,513.00		
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	985,504,004.00	616,385,316.00		
	Beban Persediaan	133,943,300.00	28,602,091.00		
	Beban Jasa	512,595,414.00	469,700,455.00		
	Beban Pemeliharaan	82,252,985.00	25,417,370.00		
	Beban Perjalanan Dinas	256,712,305.00	92,665,400.00		
8.1.05.	Beban Hibah	42,000,000.00	-		
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	-	-		
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	-	-		
8.2.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	362,056,709.39	745,085,709.74		
8.3.	BEBAN TRANSFER	-	-		
8.4.	BEBAN TAK TERDUGA	-	-		
	Beban Lain-Lain	-	450000		
	JUMLAH BEBAN	3,708,964,405.39	3,529,045,538.74		
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	-3,708,964,405.39	-3,529,045,538.74		

Sarilamak, Januari 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NOMOR	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	3,092,482,568.79	1,487,558,594.53
2	Surplus/defisit - LO	- 3,708,964,405.39	(3,529,045,538.74)
3	R/K PPKD	12,805,094,385.00	3,236,609,513.00
4	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	-	1,897,360,000.00
	Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali		
	Koreksi Hutang Tahun Lalu	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Mutasi Tambah Aset Tetap	-	2,158,393,684.00
	Mutasi Kurang Aset Tetap	-	(261,033,684.00)
	Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya	-	-
	Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel		
5	Ekuitas Akhir	12,188,612,548.40	3,092,482,568.79

Sarilamak,

Januari 2022

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


RADIMAS, S.Pd
 NIP. 19650123 198903 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan, Arsip dan Pembinaan Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksana tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepekat antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan berdampak pada sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2013 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro;
 - 2.2 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
 - 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA
 - 4.4.2 Kebijakan Akuntansi – LO
 - 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Laporan Operasional
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

- VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengelola DPA/DPPA Tahun Anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA/DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA/DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Penetapan Kinerja yang termuat dalam 5 (lima) program utama, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dijabarkan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,348,832,177	2,331,739,841	100
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,348,832,177	2,331,739,841	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118,185,700	118,057,805	100
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1,293,000	1,293,000	100
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,002,100	24,002,100	100
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,621,600	13,621,600	100
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,250,000	8,250,000	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,019,000	70,891,105	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,002,750,000	9,383,040,289	94
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,950,000	1,950,000	100
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,800,000	9,381,090,289	94

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340,043,300	337,233,965	99
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,390,000	1,382,000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,750,300	14,948,965	84
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	320,903,000	320,903,000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,345,000	82,252,985	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,963,000	72,890,385	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,670,000	4,650,600	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4,712,000	4,712,000	100

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Program Pembinaan Perpustakaan.

Program ini dijabarkan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	146,383,252	144,233,500	100
1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,813,000	16,705,000	100
2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	51,792,552	50,758,400	100
3	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	77,777,700	76,770,100	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,727,294	150,395,200	100
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	46,312,500	46,232,500	100
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	54,571,000	54,457,000	100
3	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	49,843,794	49,705,700	100

3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno ,program ini di jabarkan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	15,940,700	15,904,700	100
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	15,940,700	15,904,700	100

4. Program Pengelolaan Arsip

Sasaran dari program ini adalah peningkatan ketersediaan data dan kajian peningkatan pengelolaan arsip. Program ini di jabarkan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	67,122,132	67,002,350	100
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	27,438,420	27,428,000	100
2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	39,683,712	39,574,350	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	5,405,000	5,360,000	100
1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	5,405,000	5,360,000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	76,954,154	76,188,550	99
1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	20,525,230	19,888,500	97
2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	56,428,924	56,300,050	100

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya Pogram Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Program ini di jabarkan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu :

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	18,077,300	18,071,800	100
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	10,489,300	10,483,800	100
2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	7,588,000	7,588,000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	30,291,900	30,191,900	100
1	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	30,291,900	30,191,900	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan , dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	7,222,000	7,222,000	100
1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7,222,000	7,222,000	100

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	38,249,500	38,199,500	100
1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	16,355,000	16,355,000	100
2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	21,894,500	21,844,500	100

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.805.094.385,- Jumlah tersebut mencapai 95,22 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 13.448.529.409,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	Rp. 2.336.813.723	Rp. 2.319.403.692	99,25 %
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 991.215.686	Rp. 985.504.004	99,42 %
Belanja Pemeliharaan	Rp. 82.345.000	Rp. 82.252.985	99,89 %
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 257.338.760	Rp. 256.712.305	99,76 %
Belanja Hibah	Rp. 42.000.000	Rp. 42.000.000	100 %
Belanja Modal			
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	100 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 10.000.000.000	Rp. 9.380.290.289	93,80 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 76.550.000	Rp. 75.946.400	99,21 %
Jumlah	Rp. 13.448.529.409	Rp. 12.805.094.385	95,22 %

Pada Belanja Pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.336.813.723,- terealisasi sebesar Rp. 2.319.403.692,- atau sebesar 99,25 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 17.410.031,- disebabkan karena terjadinya mutasi dan rotasi ASN sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan realisasi dengan anggaran yang ditetapkan.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 991.215.686,- terealisasi sebesar Rp. 985.504.004,- atau sebesar 99,42 %.Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.711.682,-

Pada belanja pemeliharaan dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 82.345.000,- terealisasi sebesar Rp. 82.252.985,- atau sebesar 99,89 %.Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.92.015,-

Pada belanja perjalanan dinas dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 257.338.760,- terealisasi sebesar Rp. 256.712.305,- atau sebesar 99,76 %.Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.626.455,-

Sedangkan untuk belanja hibah dengan anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.000.000,- atau sebesar 100 %.

Pada belanja modal belanja peralatan dan mesin anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 1.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.950.000,- atau sebesar 100 %.

Pada belanja modal gedung dan bangunan dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.380.290.289,- atau sebesar 93,80 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.619.709.711,- disebabkan karena lebih rendahnya hasil tender pengadaan gedung layanan perpustakaan.

Sedangkan untuk belanja modal aset tetap lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 76.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.946.400,- atau sebesar 99,21 %. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.603.600,-

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

4.1 Ekuitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *basis akuntansi akrual*.

- 1) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Pendapatan –LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan –LRA diakui pada saat kas terima di kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui kas daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- 2) Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas setara kas diterima atau dibayar.

- 3) Basis akrual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1) Kas dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, konversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/ nilai rupiah piutang belum dilunasi.

3) Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

4) Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada peroleh persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5) Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya untuk memperolehnya kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*)

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikansi

atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable Value*).

6) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

8) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat asset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.

9) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontaro meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA

Pendapatan –LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan –LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat

1. Diterima di rekening kas umum daerah atau
2. Diterima oleh SKPD atau
3. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan –LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LO

Pendapatan –LO adalah hak atas pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan –LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau
2. Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran kas masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan –LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Belanja diakui pada saat terjadi dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD

Belanja diukur dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan akuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui saat :

Timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

Terjadinya konsumsi asset

Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlakunya waktu.

Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar bebas yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi asset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2	Belanja	12.805.094.385,-	3.236.609.513,-
2.1	Belanja Operasi	3.346.907.696,-	2.983.075.829,-
2.1.01	Belanja Pegawai	2.319.403.692,-	2.167.124.513,-
Jumlah tersebut merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2021 dan tahun 2020. jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terinci atas :			
1	Gaji dan tunjangan	1.598.216.484,-	1.622.692.956,-
2	Tambahan penghasilan ASN	547.197.208,-	544.431.557,-
3	Tambahan penghasilan Objektif Lainnya	173.990.000,-	-
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	985.504.004,-	815.951.316,-
Jumlah tersebut merupakan belanja barang dan jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp 985.504.004,- dan tahun 2020 Rp 815.951.316,- di mana jumlah realisasi belanja barang dan jasa mencapai 99,42 % dari anggaran yang ditetapkan. Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :			
1	Belanja bahan pakai habis	133.943.300,-	28.602.091,-
2	Belanja jasa kantor	506.745.414,-	252.895.154,-
3	Belanja pemeliharaan	82.252.985,-	224.983.370,-
4	Belanja perjalanan dinas	256.712.305,-	92.665.400,-
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		45.992.301,-
6	Belanja cetak dan Penggandaan		17.581.000,-
7	Belanja uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.850.000,-	
8	Belanja makanan dan minuman		18.205.000,-
9	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS		-
10	Honorarium PNS		89.850.000,-
11	Honorarium non PNS		27.950.000,-

		Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
2.1.05.	Belanja Hibah	42.000.000,-	-
1	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.000.000,-	-
Jumlah tersebut merupakan belanja hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp 42.000.000,- di mana jumlah realisasi belanja hibah mencapai 100 % dari anggaran yang ditetapkan.			
2.2	Belanja Modal	9.458.186.689,-	253.533.684,-
Belanja tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2021 sebesar Rp 9.458.186.689,- (93,85%) dan Tahun 2020 Rp 253.533.684,- .Jumlah realisasi dan anggaran belanja modal tersebut terinci atas :			
A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.950.000,-	39.500.000,-
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga		-
2	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		38.000.000,-
3	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.950.000,-	-
4	Belanja Modal Pengadaan Alat studio		-
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin ruangan AC/Kipas angin		1.500.000
B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		9.380.290.289,-	214.033.684,-
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	9.380.290.289,-	214.033.684
C. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		75.946.400,-	-
1	Belanja Modal bahan perpustakaan	69.446.400,-	-
2	Belanja Modal barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.500.000,-	-

5.2 Neraca

1. Aset	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020(Rp)
1.1. Aset Lancar		
a. Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
b. Kas di bendahara Pengeluaran	-	-
1.3. Aset Tetap		
1.3.01 Tanah	1.644.441.684,-	1.644.441.684,-
Tidak terdapat penambahan nilai aset tanah dari tahun 2020 ke tahun 2021, yang mana aset tanah tersebut merupakan mutasi tambah dari Setda dan reklas dari gedung dan bangunan (KIB C).		
1.3.02 Peralatan dan Mesin	2.301.581.805,-	2.102.588.805,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset peralatan dan mesin tahun 2021 dan 2020. Terdapat mutasi nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp 198.993.000,-dengan rincian mutasi sebagai berikut :		
Mutasi tambah		
- Belanja modal 2021	1.950.000,-	
- Reklas masuk (pengadaan mesin genset)	197.043.000,-	
- Jumlah	198.993.000,-	
1.3.03 Gedung dan Bangunan	9.602.448.443,-	543.745.000,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset gedung dan bangunan tahun 2021 dan tahun 2020. Terdapat penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan tahun 2021 sebesar Rp 9.058.703.443,- dengan rincian:		
Saldo awal (31 Desember 2021)	: 543.745.000,-	
Mutasi Tambah		
a.Pengadaan Tahun 2021	: 9.602.448.443,-	
b.Realisasi BM Gedung dan Bangunan	: 9.380.290.289,-	
c.Reklas Masuk dari KDP	: 74.628.400,-	
Jumlah	: 9.454.918.689,-	
Mutasi Kurang		
a.Reklas Keluar dari KIB B (Genset)	: 197.043.000,-	
b.Reklas Keluar KIB D(Jalan)	: 199.172.246,-	
Jumlah	: 396.215.246,-	
Total	: 9.454.918.689,-	
	: 396.215.246,-	
	9.058.703.443,-	

	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020(Rp)
1.3.04 Jalan,Irigasi dan Jaringan	199.172.246,-	-
Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan,Irigasi dan Jaringan karena ada Reklas masuk dari Gedung Bangunan (Jalan) sebesar 199.172.246,-		
1.3.05 Aset Tetap Lainnya	683.371.370,-	607.424.970,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya tahun 2021 dan 2020. Terdapat penambahan nilai aset tetap lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp 75.946.400,- yaitu berupa: Belanja modal buku : 69.446.400,- Belanja barang bercorak seni dan budaya : 6.500.000,- Jumlah : 75.946.400,-		
1.3.07 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.360.902.999,60,-	1.998.846.290,21
1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.087.172.655,-	1.940.771.380,-
Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	902.694.555,-	902.694.555,-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	421.077.250,-	949.326.825,-
Akumulasi Penyusutan Komputer	632.942.250,-	
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Studio	130.058.600,-	88.550.000,-
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	400.000,-	
Jumlah	2.087.172.655,-	1.940.771.380,-
1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	253.813.120,-	58.074.910.21,-
Akumulasi Penyusutan Rehab Gedung	67.457.850,82,-	58.074.910.21,-
Akumulasi Penyusutan Garasi Mobil	5.181.200,-	
Akumulasi Penyusutan Gedung Perpustakaan Umum Daerah	181.174.068,86	
Jumlah	253.813.120,-	58.074.910.21,-

	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020(Rp)
1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.917.224,60,-	-
Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan rincian terlampir (Tabel perhitungan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan (KIB C).		
Jumlah Aset Tetap	12.070.112.548,40,-	2.973.982.568,79
1.5. Aset Lainnya	118.500.000,-	118.500.000,-
Jumlah tersebut merupakan aset lainnya tahun 2021 dan 2020. Tidak terdapat penambahan nilai aset lainnya di tahun 2021.		
Kewajiban	-	-
Ekuitas	12.188.612.548,40,-	3.092.482.568,79
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada posisi per 31 Desember 2021 sebesar 12.188.612.548,40,- dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.092.482.568,79		

1.2 Laporan Operasional

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
7. Pendapatan Daerah		-	-
Pendapatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nihil, karna tidak termasuk OPD yang memiliki pendapatan			
8.1. Laporan Operasional		12.805.094.385	3.529.045.538,74
Laporan tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2021. jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :			
8.	BEBAN	3.708.964.405,39,-	3.529.045.538,74,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Pegawai pada Tahun 2021 sebesar Rp 2.319.403.692,- (99,25 %) dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.167.124.513,- (98,62%) sebagai berikut:			
8.1.01.	BEBAN PEGAWAI –LO	2.319.403.692,-	2.167.124.513,-
8.1.01.01.	BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN –LO	1.598.216.484,-	1.622.692.956,-
8.1.01.01.01.	Gaji pokok PNS/Uang Resrepresentasi –LO	1.233.757.160,-	1.080.224.600,-
8.1.01.01.02.	Tunjangan Keluarga –LO	104.940.573,-	91.102.879,-
8.1.01.01.03.	Tunjangan Jabatan –LO	147.990.000,-	137.880.000,-
8.1.01.01.04.	Tunjangan Fungsional –LO	11.200.000,-	9.600.000,-
8.1.01.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum –LO	22.710.000,-	16.065.000,-
8.1.01.01.06.	Tunjangan Beras –LO	64.453.800,-	54.532.260,-
8.1.01.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus –LO	2.972.953,-	2.699.537,-
8.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.377,-	
8.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.545.887,-	10.370.159,-
8.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.637.734,00	
8.1.01.01.13.	Gaji Ketiga Belas		110.949.463,-
8.1.01.01.14.	Tunjangan Hari Raya		109.269.058,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Tambahan Penghasilan PNS pada Tahun 2021 sebesar Rp 547.197.208,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 544.431.557,- sebagai berikut:			
8.1.01.02.	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS –LO	547.197.208,-	544.431.557,-
8.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja –LO	547.197.208,-	544.431.557,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn pada Tahun 2021 sebesar Rp 173.990.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 Nihil sebagai berikut:			
8.1.01.03.	BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	173.990.000,-	-

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	173.990.000,-	-
Jumlah realisasi dan anggaran Beban Persediaan pada Tahun 2021 sebesar Rp 133.943.300,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 64.388.091,- sebagai berikut:			
8.1.02.01.	BEBAN PERSEDIAAN	133.943.300,-	64.388.091,-
8.1.02.01.01.	BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	133.943.300,-	64.388.091,-
8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO	30.700.000,-	450.000,-
8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	800.000,-	
8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO	41.915.500,-	22.986.091,-
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO	26.654.900,-	5.581.000,-
8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Penggandaan-LO		12.000.000,-
8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos-LO	1.250.000,-	900.000,-
8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	1.293.000,-	1.640.000,-
8.1.02.01.01.0032.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas-LO	189.000,-	1.026.000,-
8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.116.900,-	
8.1.02.01.01.0036.	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih		1.600.000,-
8.1.02.01.01.0037.	Beban Obat-Obatan-Obat	684.000,-	
8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.090.000,-	9.405.000,-
8.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.250.000,-	8.800.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Jasa pada Tahun 2021 sebesar Rp 512.595.414,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 433.914,455,- sebagai berikut:			
8.1.02.02.	BEBAN JASA	512.595.414,-	433.914,455,-
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	377.578.965,-	416.687.455,-
8.1.02.02.01.0003.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80.000,-	

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8.1.02.02.01.0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.790.000,-	
9.1.2.25.02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.400.000,-
9.1.2.25.04	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran		13.800.000,-
9.1.2.25.05	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		10.500.000,-
9.1.2.25.06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)		45.500.000,-
9.1.2.25.07	Honorarium Bendahara ,Pembantu Bendahara dan Bendahara		15.300.000,-
9.1.2.25.08	Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang		1.350.000,-
9.1.2.24.02	Beban Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap		27.950.000,-
9.1.2.24.10	Beban Jasa Pegawai Harian Lepas		213.480.000,-
8.1.02.02.01.0024.	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	88.500.000,-	
8.1.02.02.01.0025.	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000,-	
8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	116.450.000,-	
8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,-	
8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,-	14.520.000,-
8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir	36.000.000,-	
8.1.02.02.01.0037.	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.750.000,-	
8.1.02.02.01.0052.	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9.000.000,-	
8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.175.000,-	
9.1.2.05.01	Beban Jasa Service		6.803.400,-
9.1.2.05.02	Beban Belanja Penggantian Suku Cadang		11.838.901,-
9.1.2.05.03	Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		27.350.000,-
8.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon	989.000,-	7.726.700,-

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air	429.970,-	725.000,-
8.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik	6.698.595,-	9.923.162,-
8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.647.000,-	
8.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.831.400,-	5.235.000,-
8.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman	132.000,-	1.285.292,-
8.1.02.02.01.0071.	Beban Lembur	7.106.000,-	
Jumlah realisasi dan anggaran beban Iuran Jaminan/Asuransi pada Tahun 2021 sebesar Rp 13.136.149,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 Nihil sebagai berikut:			
8.1.02.02.02.	BEBAN IURAN JAMINAN/ASURANSI	13.136.149,-	
8.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.532.332,-	
8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	650.957,-	
8.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.952.860,-	
9.1.2.24.12	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan		17.227.000,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Iuran Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan pada Tahun 2021 sebesar Rp 116.030.300,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 Nihil sebagai berikut:			
8.1.02.02.12.	BEBAN KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	116.030.300,-	
8.1.02.02.12.0001.	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.960.000,-	
8.1.02.02.12.0002.	Beban Sosialisasi	39.645.300,-	
8.1.02.02.12.0003.	Beban Bimbingan Teknis	72.425.000,-	
Jumlah realisasi dan anggaran beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 sebesar Rp 82.252.985,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 224.983.370,- sebagai berikut:			
8.1.02.03.	BEBAN PEMELIHARAAN	82.252.985,-	224.983.370,-
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.540.985,-	

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
8.1.02.03.02.0036.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	52.164.485,-	
8.1.02.03.02.0038.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.725.900,-	
8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,-	
8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.458.600,-	
8.1.02.03.02.0411.	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.362.000,-	
Jumlah realisasi dan anggaran beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan pada Tahun 2021 sebesar Rp 4.712.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 224.983.370,- sebagai berikut:			
8.1.02.03.03.	BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	4.712.000,-	224.983.370,-
8.1.02.03.03.0001.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.712.000,-	
9.1.2.18.08	Beban Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding		21.792.770,-
9.1.2.18.09	Beban Belanja Pemeliharaan Atap/Loteng		199.566.000,-
9.1.2.18.12	Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3.624.600,-
Jumlah realisasi dan anggaran beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2021 sebesar Rp 256.712.305,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 92.665.400,- sebagai berikut:			
8.1.02.04.	BEBAN PERJALANAN DINAS	256.712.305,-	92.665.400,-
8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	182.667.305,-	83.785.400,-
8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.045.000,-	8.880.000,-
8.1.02.05.	BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	5.850.000,-	
8.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.850.000,-	
8.1.05.	BEBAN HIBAH	42.000.000,-	
8.1.05.05.02.0002.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.000.000,-	

Jumlah realisasi dan anggaran Beban Penyusutan Dan Amortisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp 362.056.709,39,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 745.085.709,74,- sebagai berikut:

		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	362.056.709,39,-	745.085.709,74,-
8.4.01.	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	146.401.275,-	738.330.675,-
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	195.738.209,79,-	6.755.034,74,-
	Beban Penyusutan JIJ	19.917.224,60,-	

1.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	3.092.482.568,79,-	1.487.558.594,53
Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.487.558.594,53 dan ekuitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 sebesar Rp. 3.092.482.568,79,- yang terdiri dari:		
Aset lancar		-
Aset tetap 2021		2.973.982.568,79,-
Aset lainnya 2021		118.500.000,-
Jumlah		3.092.482.568,79,-
Surplus / defisit –LO	(3.708.964.405,39)	(3.529.045.538,74)
Surplus Defisit –LO merupakan selisih antara Pendapatan –LO dengan Beban –LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (3.529.045.538,74) dan pada tahun 2021 surplus defisit –LO sebesar Rp. (3.708.964.405,39)		

R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurang dan utang perhitungan pihak ketiga		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	-	1.897.360.000,-
Jumlah mutasi tambah aset tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0		
Mutasi tambah aset tetap	-	2.158.393.684,-
Mutasi kurang aset tetap	-	(261.033.684)
Mutasi tambah aset lainnya	-	-
Koreksi akumulasi AT-PM tahun sebelumnya	-	-
Ekuitas Akhir	12.188.612.548,40	3.092.482.568,79
Ekuitas Akhir merupakan nilai kekayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.188.612.548,40		

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah unsur penunjang Pemerintah daerah di bidang sumber daya manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati selaku kepala daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Struktur Organisasi

Didasarkan kepada peraturan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perpustakaan dan Kearsipan. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Laporan
- e. Kepala Bidang Perpustakaan
- f. Kepala Bidang Kearsipan
- g. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan
- h. Seksi Pengembangan Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK
- i. Seksi Deposit Dan Pelestarian Bahan Pustaka
- j. Seksi Promosi dan Pelayanan Perpustakaan
- k. Bidang Kearsipan
- l. Seksi Arsip Dinamis
- m. Seksi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
- n. Seksi Arsip Statis Dan Layanan Informasi Kearsipan
- o. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan
- p. Kasi Pembinaan Perpustakaan
- q. Kasi Pembinaan Kearsipan
- r. Kasi Pengawas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

- Total realisasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.805.094.385,- Jumlah tersebut mencapai 95,22 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 13.448.529.409,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	Rp. 2.336.813.723	Rp. 2.319.403.692	99,25 %
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 991.215.686	Rp. 985.504.004	99,42 %
Belanja Pemeliharaan	Rp. 82.345.000	Rp. 82.252.985	99,89 %
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 257.338.760	Rp. 256.712.305	99,76 %
Belanja Hibah	Rp. 42.000.000	Rp. 42.000.000	100 %
Belanja Modal			
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 1.950.000	Rp. 1.950.000	100 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 10.000.000.000	Rp. 9.380.290.289	93,80 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 76.550.000	Rp. 75.946.400	99,21 %
Jumlah	Rp. 13.448.529.409	Rp. 12.805.094.385	95,22 %

Dari rincian di atas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan dengan serapan dana 95,22%. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam anggaran belanja dengan realisasi belanja.

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 2.23.2.24.0.00.17. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	13.448.529.409,00	12.805.094.385,00	95,22	
2.1.	BELANJA OPERASI	3.370.029.409,00	3.346.907.696,00	99,31	
2.1.01.	Belanja Pegawai	2.336.813.723,00	2.319.403.692,00	99,25	
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.602.086.178,00	1.598.216.484,00	99,76	
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.236.174.760,00	1.233.757.160,00	99,80	
2.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.236.174.760,00	1.233.757.160,00	99,80	
2.1.01.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	105.280.037,00	104.940.573,00	99,68	
2.1.01.01.01.02.00	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.280.037,00	104.940.573,00	99,68	
2.1.01.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.055.000,00	147.990.000,00	99,29	
2.1.01.01.01.03.00	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.055.000,00	147.990.000,00	99,29	
2.1.01.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.04.00	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.710.000,00	22.710.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.05.00	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.710.000,00	22.710.000,00	100,00	
2.1.01.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	64.453.800,00	64.453.800,00	100,00	
2.1.01.01.01.06.00	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.453.800,00	64.453.800,00	100,00	
2.1.01.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.007.875,00	2.972.953,00	98,84	
2.1.01.01.01.07.00	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.007.875,00	2.972.953,00	98,84	
2.1.01.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.591,00	8.377,00	97,51	
2.1.01.01.01.08.00	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.591,00	8.377,00	97,51	
2.1.01.01.01.10.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.547.623,00	2.545.887,00	99,93	
2.1.01.01.01.10.00	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.547.623,00	2.545.887,00	99,93	
2.1.01.01.01.11.	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.648.492,00	7.637.734,00	99,86	
2.1.01.01.01.11.00	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	7.648.492,00	7.637.734,00	99,86	
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	560.297.545,00	547.197.208,00	97,66	
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	560.297.545,00	547.197.208,00	97,66	
2.1.01.02.01.00	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	560.297.545,00	547.197.208,00	97,66	
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	174.430.000,00	173.990.000,00	99,75	
2.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	174.430.000,00	173.990.000,00	99,75	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	173.230.000,00	173.190.000,00	99,98	
2.1.01.03.07.00	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.200.000,00	800.000,00	66,67	
2.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	
2.1.01.04.03.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	-	-	-	
2.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	
2.1.01.06.02.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	-	-	-	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	991.215.686,00	985.504.004,00	99,42	
2.1.02.01.	Belanja Barang	135.242.442,00	133.943.300,00	99,04	
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	135.242.442,00	133.943.300,00	99,04	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.895.650,00	30.700.000,00	99,37	
2.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	800.000,00	800.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.958.520,00	41.915.500,00	97,57	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.673.872,00	26.654.900,00	99,93	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.293.000,00	1.293.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	189.000,00	189.000,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.116.900,00	3.116.900,00	100,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Obat-Obatan-Obat	720.000,00	684.000,00	95,00	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.095.500,00	11.090.000,00	99,95	
2.1.02.01.01.00	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	
2.1.02.02.	Belanja Jasa	510.439.484,00	506.745.414,00	99,28	
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	380.395.300,00	377.578.965,00	99,26	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	80.000,00	80.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.790.000,00	15.790.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	88.500.000,00	88.500.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	116.450.000,00	116.450.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.175.000,00	5.175.000,00	100,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Telepon	1.350.300,00	989.000,00	73,24	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Air	1.000.000,00	429.970,00	43,00	
2.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	8.200.000,00	6.698.595,00	81,69	
2.1.02.02.01.00	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.652.000,00	3.647.000,00	99,86	
2.1.02.02.01.00	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	6.831.400,00	94,88	
2.1.02.02.01.00	Belanja Paket/Pengiriman	140.000,00	132.000,00	94,29	
2.1.02.02.01.00	Belanja Lembur	7.108.000,00	7.106.000,00	99,97	
2.1.02.02.02.	Belanja luran Jaminan/Asuransi	13.218.454,00	13.136.149,00	99,38	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.600.000,00	10.532.332,00	99,36	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	651.804,00	650.957,00	99,87	
2.1.02.02.02.00	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.966.650,00	1.952.860,00	99,30	
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	116.825.730,00	116.030.300,00	99,32	
2.1.02.02.12.00	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.040.000,00	3.960.000,00	98,02	
2.1.02.02.12.00	Belanja Sosialisasi	40.360.730,00	39.645.300,00	98,23	
2.1.02.02.12.00	Belanja Bimbingan Teknis	72.425.000,00	72.425.000,00	100,00	
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	82.345.000,00	82.252.985,00	99,89	
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.633.000,00	77.540.985,00	99,88	
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	52.173.000,00	52.164.485,00	99,98	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.1.02.03.02.00	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.790.000,00	20.725.900,00	99,69	
2.1.02.03.02.01	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	1.458.600,00	99,90	
2.1.02.03.02.04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000,00	1.362.000,00	98,70	
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.712.000,00	4.712.000,00	100,00	
2.1.02.03.03.00	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.712.000,00	4.712.000,00	100,00	
2.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	257.338.760,00	256.712.305,00	99,76	
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	257.338.760,00	256.712.305,00	99,76	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	183.105.760,00	182.667.305,00	99,76	
2.1.02.04.01.00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.233.000,00	74.045.000,00	99,75	
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	
2.1.02.05.01.00	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	
2.1.05.	Belanja Hibah	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
2.1.05.03.	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.03.01.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.03.02.	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	-	-	-	
2.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
2.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
2.1.05.05.02.00	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
2.2.	BELANJA MODAL	10.078.500.000,00	9.458.186.689,00	93,85	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	
2.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	
2.2.02.01.02.	Belanja Modal Alat Besar Apung	-	-	-	
2.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	
2.2.02.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	
2.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	
2.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	
2.2.02.10.02.00	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	9.380.290.289,00	93,80	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	9.380.290.289,00	93,80	
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000.000,00	9.380.290.289,00	93,80	
2.2.03.01.01.00	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.000.000.000,00	9.380.290.289,00	93,80	
2.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
2.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	-	-	-	
2.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	
2.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	-	-	-	
2.2.04.03.04.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-	-	
2.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	-	
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	76.550.000,00	75.946.400,00	99,21	
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	70.050.000,00	69.446.400,00	99,14	
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	70.050.000,00	69.446.400,00	99,14	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Filsafat	4.410.000,00	4.400.000,00	99,77	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Agama	7.050.000,00	6.975.900,00	98,95	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	5.120.000,00	5.119.500,00	99,99	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	20.000.000,00	19.979.000,00	99,90	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	5.350.000,00	5.320.300,00	99,44	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	4.080.000,00	4.074.000,00	99,85	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	7.100.000,00	6.946.200,00	97,83	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Serial	6.800.000,00	6.790.500,00	99,86	
2.2.05.01.01.00	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	10.140.000,00	9.841.000,00	97,05	
2.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
2.2.05.02.02.	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
2.2.05.02.02.00	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.448.529.409,00)	(12.805.094.385,00)	95,22	

SARILAMAK, 31 Desember 2021
 KEPALA BAKOSIP/KELOMPOK KERJA
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM
 NIP. 19660913 198603 1 009